

**PELAKSANAAN TUGAS RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
(RT/RW) KELURAHAN DELIMA PEKANBARU**

YANUARDI
yan.geforce@yahoo.com

Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si

Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,
Telp/Fax (0761) 63277
Contact Person
082169818189

ABSTRACT

Yanuardi. 0801131570. *“Implementation of Rukun Tetangga and Rukun Warga jobs In Kelurahan Delima Pekanbaru”* (guided by Dr. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si)

Rukun Tetangga (RT) is a division of territory in Indonesia below Rukun Warga (RW). Rukun Tetangga is not including division of government administration, and the formation passes through the citizens meeting. It is formed for social service that fixed by Desa or Kelurahan. Rukun Tetangga is led by Ketua RT who chose by the citizens. An RT consists of a group of houses (head of family).

Rukun Warga (RW) is a division of territory in Indonesia below Dusun or Lingkungan. Rukun Warga is not including division of government administration, and the formation passes through the citizens meeting. It is formed for social service that fixed by Desa or Kelurahan. An RW consist of some RT.

Rukun Tetangga (RT) and Rukun Warga (RW) are social organizations that established and built up of government to maintain and preserve the value of Indonesia social life based on work together and family principles and for helping increase the smoothness of government jobs, development and the sociality in the village and Kelurahan. Every RT consist of the most of 30 KK (Head of Family) for village and the most of 50 KK (Head of Family) for Kelurahan. The formation of RT and RW are based on Permendagri No. 7/1983.

Kelurahan is a work territory of Lurah as area instrument of Kabupaten / Kotamadya / Kota administrasi below Kecamatan. Territory in the government structure at Pekanbaru, Kelurahan is the smallest organization unit and the nearest is social life. The meaning, the top of spear in carrying out the area self-sufficient at Pekanbaru is prearranged by the leader role of Lurahs.

In cultivating of the institutions to achieve the social service satisfaction there are some factors that influence RT/RW jobs, and Social service Satisfaction.

PENDAHULUAN

Keberadaan lembaga masyarakat bertujuan untuk mempercepat masyarakat yang tertib, aman dan sejahtera. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan kreatif sehingga dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat.

Dalam system pemerintahan Republik Indonesia, dikenal dengan istilah Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau dengan singkatan RT dan RW, yang merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang berada di wilayah kelurahan atau desa. Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak disebut dan tidak termasuk dalam system pemerintahan, dan pembentukannya adalah melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga dipimpin oleh Ketua RW dan Ketua RT keduanya dipilih oleh warga sekitar RW maupun sekitar RT. Dewasa ini banyak pemilihan Ketua RT dan RW di Indonesia yang dimodel mirip Pemilihan Presiden atau Pemilihan Kepala Daerah yaitu dengan pemungutan suara.

Bagaimana sebenarnya eksistensi lembaga RT dan RW itu dalam masyarakat. Secara historis, kelahiran lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT dan RW dibidani oleh Pemerintah melalui Pemandagri nomor 7 tahun 1983 yang mengatur tentang Pembentukan Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Meskipun ditujukan sebagai lembaga kemasyarakatan, RT dan RW pada hakekatnya dilahirkan untuk membantu berbagai pelaksanaan kegiatan.

Selain sebagai bentuk rentang kontrol pemerintahan ditingkat grass root, RT dan RW juga menjalankan fungsi-fungsi Sosial Development dan pembinaan keamanan ketertiban masyarakat, sebut saja seperti layanan administrasi melalui Surat Pengantar RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya dalam deteksi dini dan memproteksi terhadap potensi kesalahan identifikasi terhadap status kependudukan warga yang dilayani. Kemudian pengadaan forum

Pertemuan rutin RT dan RW yang sangat membantu bagi pemerintahan khususnya untuk sosialisasi berbagai program pemerintah. Belum lagi berbagai kegiatan yang mereka laksanakan terkait dengan pembinaan kehidupan sosial seperti pengadaan kegiatan Posyandu, Poskamling, pengadaan Dana Sosial dan Kematian hingga penggalan potensi swadaya masyarakat guna menunjang kegiatan pembangunan yang di selenggarakan oleh pemerintah.

Belum cukup sampai disini Ketua RT dan Ketua RW harus memiliki mental ekstra kuat khususnya atas kebijakan yang diambilnya yang tentu tidak akan pernah memuaskan semua pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda-beda. Karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT dan RW tetapi sesungguhnya mereka memainkan peranan yang besar dalam pembinaan kehidupan sosial.

Untuk menghidupkan lembaga kemasyarakatan seperti RT dan RW agar sejalan dengan perkembangan dinamika sosial yang ada maka Pemerintahan Kota Pekanbaru mengatur kembali berupa Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Pemerintah ingin menciptakan kembali organisasi RT dan RW yang bersifat partisipatif yang di gerakkan oleh masyarakat sendiri. Dengan adanya peraturan daerah ini maka pemerintah Kota Pekanbaru mencoba menciptakan demokrasi di ruang lingkup terkecil yaitu lingkungan RT dan RW sekaligus memberikan legitimasi kepada ketua RT dan ketua RW yang terpilih.

Kebijakan peraturan daerah ini pada dasarnya adalah proses serangkaian keputusan yang di desain untuk mengatasi masalah publik. Masalah yang dihadapi adalah menurunnya legitimasi RT dan RW di lingkungan masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk itu perlu ada aturan yang jelas mengatur kembali tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) RT dan RW tersebut. Tujuannya adalah agar aspirasi-aspirasi masyarakat yang berada dalam wilayahnya dapat tertampung dalam kebijakan-

kebijakan pemerintah daerah yang dapat membangkitkan partisipasi sosial yang lebih besar dan program-program pemerintah dapat tersampaikan langsung ke dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Tugas pokok dan fungsi merupakan kerangka acuan yang dilaksanakan pemerintah, khususnya Pemerintah Kota, dimana penetapan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keputusan Walikota. Tugas pokok dan fungsi yang dituangkan dalam keputusan Walikota diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari Ketua RT dan Ketua RW di kota Pekanbaru.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga pasal 3, Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotong royongan
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Berbagai usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan demi meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelaksanaan tugas RT dan RW, sebagaimana yang tertera dalam Perda No12 tahun 2002 Kota Pekanbaru. Adapun tugas dan fungsi dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Delima adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 pasal 7 RT dan RW mempunyai tugas dan fungsi :

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat

4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintahan Daerah.
7. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Dari tugas dan fungsi RT dan RW Kelurahan Delima tersebut di atas dapat diketahui bahwa tugas dari RT dan RW Kelurahan Delima adalah sepenuhnya melayani masyarakat. Namun realita dilapangan tidak semua tugas dan fungsinya tersebut terlaksana dengan baik. Berhasilnya suatu organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dilihat bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik atau masyarakat. Seiring berkembangnya Kota Pekanbaru menjadi Kota besar yang artinya semakin berkembangnya sifat individualisme fenomena ini biasanya terjadi di daerah kawasan perumahan-perumahan sebagai contoh di Kelurahan Delima seperti :

- 1). Kurang terciptanya rasa kegotong royongan dan partisipasi masyarakatnya terhadap kegiatan-kegiatan yang di ciptakan oleh pengurus RT maupun RW yang mana setiap kali masyarakat diajak hampir semua tidak sempat dan beralasan karena banyaknya pekerjaan mereka sehingga kemudiannyatimbul sikap malas pada ketua RT maupun RW untuk mengajak kembali mengadakan kegiatan-kegiatan ataupun gotong royong.

- 2). Dalam hal keamanan, sudah sangat jarang kegiatan seperti ronda dan aturan tamu wajib lapor 1x24 jam, tapi sekarang masyarakat menganggap sepele hal tersebut dan beralasan tidak sempat atau sibuk. Sedangkan daerah kelurahan Delima sudah banyak laporan-laporan kehilangan, dan warga baru yang tidak melapor ke Ketua RT maupun Ketua RW sehingga jika ada sesuatu yang terjadi pada warga tersebut tentu Ketua RT dan Ketua RW sangat sulit melapor pada pihak berwajib karena tidak mengetahui data-data ataupun informasinya.
- 3). Jika kita lihat pada kebersihan memang diperumahan-perumahan yang elit tidak perlu diragukan karena mereka mempunyai petugas kebersihan yang selalu siap. Namun jika kita lihat yang di komplek ruko hampir tidak terlihat adanya kebersihan karena mereka yang bertempat tinggal di ruko menumpuk sampah mereka didepan rukonya dan juga saluran parit mereka sering tersumbat sehingga itu yang menyebabkan daerah Kelurahan Delima di wilayah komplek ruko sering banjir dan jarang adanya ketua RT dan RW yang mengajak warga nya untuk bersama-sama melakukan kegiatan gotong royong untuk membersihkan sampah dan menjaga lingkungan. Namun kenyataannya mereka hanya menunggu petugas dari dinas kebersihan umum untuk membersihkan sampah-sampah tersebut
- 4). Kurang terjalinnya hubungan bermasyarakat sehingga tidak heran nya mereka tidak mengetahui siapa-siapa yang tinggal di sekitar tempat tinggal mereka sampai-sampai ada juga warganya yang tidak mengetahui siapa ketua RT ataupun ketua RW mereka.
- 5). Dalam Perda tertulis bahwa ketua RT dan ketua RW bersama-sama bertugas membantu semua program-program pemerintah dan membantu menyebarkannya. Namun masih terdapat hubungan yang buruk antara ketua RT dengan ketua RW sehingga itu mempengaruhi kepada masyarakat.

Organisasi dapat diartikan 2 macam yaitu : (1). Dalam arti statis, organisasi sebagai wadah bersama sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (2). Dalam arti dinamis, organisasi sebagai suatu sistem atau kegiatan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. (Ibnu Syamsi, 2003:13)

Organisasi merupakan wadah kegiatan manusia yang menjadikan manusia lebih rasional, efektif, efisien dan alat pencapaian tujuan dalam hidup. Organisasi yang didirikan pada dasarnya ingin mencapai tujuan dan sasaran yang telah disepakati bersama dengan lebih efisien dan efektif dengan tindakan yang dilakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab

Organisasi jalan bagi setiap orang untuk mencapai prioritas-prioritas dalam hidupnya, karena didalam tubuh organisasi sumber daya tenaga manusia dan sumber daya tenaga lain yang dapat membentuk suatu jalinan yang utuh yang menggerakkan roda kegiatan organisasi. Dengan

berorganisasi seseorang dapat mengembangkan kemampuan diri, meningkatkan intelektualitas dan meraih kesuksesan.

Chester L. Barnard dalam Miftah Thoha (2007:114) organisasi adalah sebuah sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. Dengan demikian Barnard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur kekayaan dari suatu organisasi, antara lain:

- 1) organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran.
- 2) Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut
- 3) Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat darisebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota lainnya. Dalam hal ini Barnard menekankan peranan seseorang dalam organisasi, diantaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian lainnya harus membuat keputusan.

Menurut *Schein* organisasi adalah koordinasi kegiatan manusia yang direncanakan untuk maksud dan tujuan bersama melalui pembagian tugas dan fungsi serta serangkaian wewenang dan tanggung jawab (Nawawi, 2005:9). Sementara itu *Dessler* mengemukakan pendapatnya bahwa organisasi dapat diartikan sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap kegiatan tersebut telah tersusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada organisasi tersebut masing-masing personal yang terlibat didalamnya diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang di koordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Dimana tujuan organisasi tersebut dirumuskan secara musyawarah, sebagai tujuan bersama yang diwujudkan secara bersama-sama. (Dessler, 1999:16)

Menurut *James d. Money* *organization is from every human*

association for attainment of common purposes artinya organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. (Hasibuan 2001:25). Kemudian Sondang P. Siagian mendefinisikan organisasi adalah setiap bentuk perserikatan antara dua orang atau lebih yang berkerja sama untuk mencapai tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan. (Sondang P. Siagian 2003:8)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sondang P. Siagian dalam bukunya "Filsafat Administrasi" (Sondang P. Siagian, 2003:119) organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki prinsip atau ciri pokok sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas, karena tanpa tujuan yang jelas organisasi dapat diumpamakan dengan sebuah kapal yang tidak mempunyai pelabuhan tujuan yang akan dicapai sehingga terombang-ambing ditengah laut.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap anggota organisasi tersebut dan diterima dengan baik sehingga manusia yang harus menggerakkan organisasi tersebut benar-benar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dengan semangat kerja yang tinggi.
3. Adanya kesatuan perintah dan kesatuan arah, sehingga dapat mencapai tujuannya secara terpinpin dan sukses dalam arti efektif dan efisien.
4. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, prinsip ini penting karena apabila wewenang lebih besar dari tanggung jawab akan mudah menimbulkan penyalahgunaan wewenang, seperti korupsi, main perintah, menindas bawahan dan sebagainya. Sebaliknya, apabila tanggung jawab lebih besar dari wewenang akan menyebabkan petugas menjadi ragu-ragu atau

- tidak aman dalam menjalankan suatu tindakan tertentu.
5. Adanya pembagian tugas pekerjaan yang merata dan sesuai dalam arti sesuai dengan bakat dan kemampuan orang-orang yang disertai untuk melakukan tugas, serta sesuai dengan hasil yang ingin dicapai, yang dipengaruhi oleh perkembangan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi yang makin maju. Prinsip ini penting sekali karena hakikat organisasi tidak lain adalah pembagian tugas (*division of work*).
 6. susunan atau struktur organisasi harus dibuat sesederhana mungkin yaitu sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai.
 7. Pola dasar organisasi harus relatif permanen/tetap, meskipun struktur organisasi dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi tetapi perubahan tersebut harus diusahakan secara luwes atau fleksibel sehingga tidak perlu merubah pola dasar organisasi. Dengan demikian susunan organisasi harus bersifat fleksibel tetapi harus dapat menjamin kontinuitas atau berkelanjutan.
 8. Adanya jaminan stabilitas jabatan atau pekerjaan (*security of tenure*). Karena organisasi terdiri dari manusia, maka harus ada jaminan terhadap manusia sebagai anggota organisasi agar merasa aman/tenang tanpa khawatir untuk dipecat secara semena-mena.
 9. Pemberian balas jasa atau imbalan kepada anggota organisasi yang setimpal dengan jasa atau prestasi yang diberikan. Hal ini perlu dilaksanakan sesuai dengan motto *equal pay for equal work*.

(Malinowski 2003:2) mengatakan organisasi sebagai suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas-tugas, terikat pada lingkungan tertentu, menggunakan alat teknologi dan patuh pada peraturan.

Selanjutnya (James D. Money 2003:2) mengatakan bahwa organisasi timbul bilamana orang-orang yang bergabung didalam suatu usaha mencapai tujuan bersama.

(Chester I. Barnard 2003:3) mengatakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan satu dengan yang lain, mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan (Henry L. Sisk 2003:3) memandang organisasi sebagai suatu kesatuan, yaitu sekelompok orang yang terlibat bersama-sama di dalam hubungan yang resmi untuk mencapai tujuan-tujuan.

(Munir H. Thayeb 2003:3) menyatakan organisasi dapat dilihat dengan 2 cara yang berbeda. Cara pertama adalah melihat organisasi sebagai suatu sistem terbuka dan cara kedua adalah melihat organisasi sebagai sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang bersama. Suatu organisasi yang dipandang sebagai suatu sistem terbuka, pasti terdiri dari sub-sistem yang saling berkaitan dan organisasi sebagai sistem terbuka memperoleh *input* untuk diolah yang berasal dari lingkungan serta menyalurkan *output* hasil pengolahan ke lingkungan kembali. Berdasarkan beberapa defisiensi organisasi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah ditentukan secara sistematis dan didalamnya ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi tersebut.

Pertingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila bergerak setifaknya suatu organisasi kearah pencapai tujuan sangat tergantung pada kemampuan manusia dalam menggerakkan organisasi itu kearah tujuan yang telah ditentukan. Dengan organisasi tercipta keteraduan, pikiran, konsepsi, tindakan dan ketrampilan yang dimiliki oleh tiap-tiap personel yang terlibat didalamnya untuk berhimpun menjad satu kesatuan kekuatan yang terkoordinasi untuk mencapai tujuannya.

Organisasi yang baik adalah yang secara efektif dan efisien yang mengkombinasikan sumber-sumber daya guna menetapkan strategi- strategi. Sumber daya manusia merupakan faktor dinamis yang mampu menentkan maju mundurnya suatu organisasi, sehingga organisasi yang dimiliki sumber daya manusia yang handal akan memenangkan persaingan.

Moekijat (2002:9) mengatakan pelaksanaan tugas adalah berapa banyak pekerjaan yang dapat dicapai dan diharapkan dari tiap-tiap pegawai

Menurut Siagin (2001:126) mengatakan pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya. Pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.

Menurut Agus Darma (2000:9) pelaksanaan tugas adalah sebagai sesuatu yang dikerjakan atau produk jasa yang dihasilkan yang memberikan seseorang atau sekelompok orang.

Sedangkan menurut Winardi (2004:75) ada beberapa indikator untuk melihat pelaksanaan tugas yaitu :

1. Pemanfaatan waktu yang tepat
2. Jumlah output
3. Kesiediaan untuk bekerjasama
4. Kualitas pekerjaan

Menurut Musanef (2005:52) bahwa pelaksanaan tugas adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya, dimana pada taraf operasional kerja dari seseorang pegawai dalam lingkungan organisasi tertentu dapat diketahui dari :

1. Inisiatif yang tinggi dalam bekerja, yaitu adanya prakarsa atau langkah pertama dari pegawai itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tanpa harus mengikuti perintah.
2. Kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas yaitu kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugasnya dengan menggunakan keahlian dibidangnya masing-masing

3. Keikutsertaan pegawai dalam menghadapi pendidikan dan pelatihan, yaitu adanya motivasi pegawai dalam mengikuti program pendidikan dan latihan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk meningkatkan keahlian dan kecakapan pegawai.

Menurut Soeprihartono (2002:99) Indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah :

1. Penguasaan Tugas,
2. Kemampuan bekerjasama,
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya,
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Menurut Basri (2005:25) ada tiga jenis pelaksanaan untuk tercapainya suatu pengembangan yaitu :

1. Pelaksanaan secara langsung yaitu pemerintah langsung melakukan sendiri berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang mendukung pelaksanaan pengembangan.
2. Pelaksanaan secara tidak langsung yaitu berbagai keputusan atau perundang-undangan, dimana pemerintah tidak melaksanakan sendiri pengembangan tersebut tetapi hanya mengekuarkan ketentuan dan aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan suatu organisasi, sehingga bergerak kearah yang sesuai dengan tujuan untuk mencapai program yang telah ditentukan.
3. Pelaksanaan campuran yaitu dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksud terbuka kesempatan atau peranan yang dapat dilaksanakan baik oleh instansi pemerintah maupun orang kemasyarakatan ataupun campur keduanya untuk melaksanakan pengembangan bersama.

METODE

Penelitian ini merupakan suatu bentuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini mempunyai ciri-ciri antara lain setting yang aktual, peneliti adalah instrumen kunci, data bersifat deskriptif, menekankan kepada proses, analisis datanya bersifat deduktif

dan *meaning* (pemaknaan) tiap even merupakan perhatian yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dasar pertimbangan memilih penelitian kualitatif adalah (1) data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat; (2) dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab akibat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat; (3) dapat membimbing untuk memperoleh penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan, (4) dapat melangkah lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.

Pemilihan desain kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata atau gambar daripada data dalam wujud angka-angka. Pendekatan yang kualitatif berakar dari data, dan teori berkaitan dengan pendekatan tersebut diartikan sebagai aturan dan kaidah untuk menjelaskan proposisi yang dapat diformulasikan secara deskriptif ataupun proporsional.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah peristiwa-peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan termasuk perilaku dan sikap subyek/aktor yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka peneliti mengumpulkan data atau informasi dari informan kunci (key informan) sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Dari informan kunci inilah kemudian dilanjutkan mencari dan mengumpulkan data atau informasi dari para informan berikutnya dengan menggunakan teknik "*snowball sampling*" atau bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar.

HASIL

Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga terlebih dahulu dijelaskan tugas dari

masing-masing pelaksana yang terkait dalam pelaksanaannya.

- a. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- b. Menggerakkan Gotong Royong swadaya dan partisipasi masyarakat.
- c. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
- d. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
- e. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- f. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan Pemerintahan Daerah.
- g. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan amanat pemerintah tersebut, masing-masing RT dan RW mulai membenahi diri pada tataran operasional. Dalam pelaksanaannya masing-masing RT dan RW mempunyai kendala yaitu :

1. Administrasi

Rukun Tetangga dan Rukun Warga bukanlah bagian dari struktur pemerintahan sehingga tidak ada rentang komando dan kendali antara struktur pemerintahan pada tingkat terendah (Kelurahan/Desa) dengan RT dan RW. Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada dasarnya dibentuk oleh masyarakat yang hidup pada suatu lingkungan tertentu dan berbasis sukarela. Hubungan antara aparat struktur pemerintahan pada tingkat terendah dengannya bukanlah hubungan atasan bawahan, namun lebih pada hubungan kemitraan. Sebagai konsekuensi, apa yang dikehendaki oleh aparat pemerintahan belum tentu dapat diterapkan begitu saja pada RT dan RW. Disamping itu, tidak ada semacam petunjuk standar pembinaan RT dan RW yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menjadi acuan dalam hubungan

antara struktur pemerintahan terendah dengan RT dan RW.

2. Hukum

Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak memiliki kekuatan hukum dalam bertindak mengawasi warganya kecuali menyangkut wajib lapor 2x24 jam bagi tamu atau pendaatang baru dilingkungan RT atau RW tersebut. Jika hal tersebut tidak dilakukan, Ketua RT atau Ketua RW tidak dapat berbuat apapun kecuali melaporkannya kepada aparat keamanan yaitu polisi karena RT atau RW sesungguhnya tidak memiliki aparat keamanan yang mengawasi lingkungannya, yang memiliki aparat keamanan adalah kelurahan atau desa dan kewenangannya pun terbatas.

3. Budaya

Di Kota-kota besar, lingkungan permukiman biasanya bersifat multikultural dimana bermacam orang dari beragam budaya hidup bersama di suatu lingkungan. Sehingga sudah pasti setiap RT dan RW biasanya merupakan lingkungan yang multikultural pula. Dalam lingkungan yang multikultural tersebut, pengurus RT dituntut pemahamannya akan latar belakang budaya yang beragam. Masalahnya adalah tidak jarang dijumpai bahwa tidak sedikit pengurus RT atau RW berasal dari lingkungan budaya yang berbeda dengan mayoritas warganya.

4. Kualitas sumber daya manusia

Selama ini pekerjaan menjadi Ketua RT atau Ketua RW merupakan sebuah pekerjaan sosial. Yang patut diperhatikan adalah tidak semua pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga diisi oleh sumber daya manusia yang memadai, dalam kondisi seperti ini terlebih lagi pada lingkungan yang multikultural dapat diprediksi bahwa tidaklah gampang menata kehidupan di tingkat RT dan RW apabila kualitas sumber daya manusia Ketua RT atau Ketua RW rendah.

Inilah fenomena sosial yang patut menjadi perhatian banyak kalangan khususnya pemerintah. Karena meskipun banyak yang memandang sebelah mata terhadap keberadaan RT dan RW, tetapi sesungguhnya mereka memainkan peranan besar dalam pembinaan kehidupan sosial.

PEMBAHASAN

Proses pada pelaksanaan tugas adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang efektif. Pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat. Namun demikian agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, beberapa faktor harus perlu diperhatikan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pertama, pelaksanaan kegiatan harus mempunyai tujuan yang jelas. Kedua, memenuhi kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga tersebut. Ketiga, kebutuhan-kebutuhan yang telah terpenuhi tersebut dapat dikelola dengan baik. Keempat, menjalankan pelaksanaan tugas yang ada sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya kondisi pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW, maka pada uraian berikut penulis akan menjelaskan berdasarkan indikator tercapainya tujuan pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW. Pelaksanaan tugas Ketua RT dan Ketua RW mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Delima. Jadi untuk mengetahui pelaksanaan tugas Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima, penulis menggunakan konsep teori Soeprihartono (2002:99), yakni sebagai berikut :

1. Penguasaan Tugas,
2. Kemampuan bekerjasama,
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya,
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat.

Untuk mengetahui tanggapan informan terhadap indikator-indikator diatas tersebut penulis akan menguraikan secara jelas seperti yang tercantum berikut ini :

1. Penguasaan Tugas.
 - a. Ketua RT dan RW memahami tugas yang diberikan.
 - b. Ketua RT dan RW mengerti dengan tugas yang diberikan.
2. Kemampuan Bekerjasama

Kerja sama merupakan proses hubungan antara yang satu dengan yang lain yang mempunyai tugas dan tujuan yang sama. Kerja sama pada dasarnya merupakan bentuk penyelesaian tugas yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

- a. Mampu bekerja sama dengan baik dengan antara Ketua RT dan Ketua RW.
- b. Ketua RT dan Ketua RW mampu berkomunikasi dengan baik pada atasan :

Komunikasi dalam organisasi adalah komunikasi di suatu organisasi yang dilakukan pimpinan, baik dengan para karyawan maupun dengan khalayak yang ada kaitannya dengan organisasi, dalam rangka pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Effendy,1989:214).

3. Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Pada Waktunya

- a. Ketua RT dan Ketua RW mampu melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Tugas yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi RT dan RW.

4. Adanya Laporan Hasil Kerja Yang Tepat

Laporan mempunyai peranan yang penting pada suatu organisasi karena dalam suatu organisasi dimana hubungan antara atasan dan bawahan merupakan bagian dari keberhasilan organisasi tersebut. Dengan adanya hubungan antara perseorangan dalam suatu organisasi baik yang berupa hubungan antara atasan dan bawahan, ataupun antara sesama karyawan yang terjalin baik maka akan bisa mewujudkan suatu sistem *delegation of authority* dan pertanggung jawaban akan terlaksana secara efektif dan efisien dalam organisasi. (Menurut Quible dalam Sukoco 2005:177) menyatakan bahwa laporan merupakan perwujudan pertanggung jawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggung jawab dan pelimpahan wewenang untuk

mendukung pelaksanaan tanggung jawab tersebut

- a. Ketua RT dan Ketua RW mampu membuat laporan harian maupun bulanan

Pelaksanaan (*actuating*), yaitu pelaksanaan kegiatan dari apa yang telah dirancang dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian, akuisisi atau pelaksanaan ini dilakukan dalam kegiatan sehari-hari didalam organisasi. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah penting dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan, tanpa disertai pengawasan pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi, semua fungsi terdahulu, tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Karena berjalan atau tidaknya suatu rencana yang sudah dilaksanakan, tanpa disertai pengawasan yang intensif, maka rencana-rencana tersebut pasti akan rentan terhadap penyimpangan-penyimpangan atau bahkan bisa mengalami kegagalan. Fungsi manajemen yang berkenaan dengan pengawasan terhadap aktivitas pegawai menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Pengawasan merupakan proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan atau tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Beda pengendalian dengan pengawasan adalah pada wewenang dari pegembang kedua istilah tersebut. Pengendalian memiliki

wewenang turun tangan yang tidak dimiliki oleh pengawas. Pengawas hanya member saran, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian. Jadi, pengendalian lebih luas dari pengawasan.

Dalam menjawab persoalan yang ada, penulis berpedoman pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan, yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan standar

Dalam melakukan pengawasan maka harus adanya standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus diikuti, ketentuan atau standar setelah diadakannya penilaian akan diketahui mana yang salah dan mana yang benar dan selanjutnya akan dilakukan tindakan koreksi terhadap pelanggaran ketentuan yang ada.

Penetapan standar dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya hal ini dilakukan guna meminimalisir penyimpangan yang terjadi ketentuan ini berupa :

a. Adanya Pembagian Tugas secara jelas
Dalam suatu pengorganisasian sangat dibutuhkan adanya pembagian kerja dari setiap personil yang bertugas. Dengan adanya pembagian kerja tersebut, maka pekerjaan akan dapat terselesaikan dengan efektif dan tidak terjadi adanya tumpang tindih. Hal ini karena pekerjaan dibagi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Waktu Pengawasan

Dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan pada angkutan travel di Kota Pekanbaru dibutuhkan waktu untuk dilakukannya pengawasan, hal ini bertujuan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap petugas yang melakukan pengawasan dan dapat mengoreksi kinerja petugas apakah sesuai dengan prosedur yang ada dilapangan atau tidak.

c. Sosialisasi

Salah satu tindakan penilaian terhadap pengawasan yang dilakukan berupa

sosialisasi yaitu pemberitahuan dan pengarahan. Ini merupakan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi atau kesalahan yang sama

2. Mengadakan penilaian

Penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna untuk mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama.

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis merupakan salah satu tindakan penilaian yang dilakukan hal ini bertujuan untuk memperoleh data atau fakta-fakta yang berupa laporan-laporan yang diberikan masyarakat atau petugas itu sendiri ini dapat berupa Media Cetak atau media lainnya yang berupa laporan.

b. Pengawasan Langsung

Proses mengamati secara langsung kelengkapan dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap petugas yang melakukan pengawasan agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan petugas dapat bekerja lebih bertanggung jawab

3. Mengadakan tindakan perbaikan

Tindakan perbaikan yang dilakukan terhadap penyimpangan yaitu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan atau penyimpangan yang sama. Perbaikan terhadap penyimpangan ini berupa :

a. Pemberian Sanksi

Bentuk perbaikan terhadap pelanggaran yang terjadi dalam pengawasan angkutan travel. Baik yang dilakukan oleh petugas maupun oleh PO adalah berupa sanksi. Sanksi ini diberikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan tujuan agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang

sama dilakukan. Dimana sanksi yang diberikan apabila petugas yang melakukan kesalahan akan dikenakan teguran dan pemberhentian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru, ditemukan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) pada angkutan travel di Kota Pekanbaru. Adapun faktor-faktor tersebut adalah

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa pelaksanaan tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Delima belum berjalan dengan cukup baik.

1. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Ruku Warga Kelurahan Delima
 - a. Penguasaan Tugas
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga Kelurahan Delima secara umum sudah memahami dan mengerti tugas yang diberikan. Namun kalau yang benar-benar ahli dalam bidang tugas yang diberikan itu tergantung pengalaman pribadi dari Ketua Rukun Tetangga atau Ketua Rukun Warga tersebut.
 - b. Kemampuan Bekerjasama
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga masih banyak yang belum bekerjasama dengan baik terhadap sesama Ketua RT dan Ketua RW. Karena masih terasanya persaingan antara Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga.
 - c. Kemampuan Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Pada Waktunya
Pihak Kelurahan Delima mengatakan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mampu menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Namun dari beberapa masyarakat mengatakan ada beberapa Ketua RT dan Ketua

RW yang belum sesuai dengan fungsinya.

- d. Adanya Laporan Hasil Kerja yang tepat
Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mampu membuat laporan hasil kerja maupun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan (Lurah). Namun untuk laporan harian tidak ada.
2. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Delima
 - a. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Delima masih belum memadai secara kualitas maupun kuantitas terutama kemampuan dalam mengerti kebutuhan warganya.
 - b. Keadaan RT dan RW Kelurahan Delima
Keadaan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga seperti saling mengisi, dukungan atau suport dari pimpinan, dan kelengkapan saran dan prasarana dinilai masih kurang.
 - c. Partisipasi Masyarakat
Partisipasi masyarakat Kelurahan Delima kepada Ketua RT dan RW dinilai bagus walaupun masih terdapat kesenjangan-kesenjangan seperti masih ada warga yang tidak mengenal Ketua RW nya dengan alasan rumah RW terlalu jauh dan ada juga warga se-RT tidak peduli RW mereka, karena RW pilihan mereka kalah sewaktu pemilihan Ketua RW yang lalu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard, Chester I. 2003. *Perilaku organisasi*. Jakarta: Pustaka Raya.
- Dessler, Gerry, 1999. *Manajemen Personalia* (Ahli Bahasa: Darma), Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Faisal H. Basri. 2005. *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*. Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.

- Hasibuan, 2001 “*Kualitas Pelayanan Masyarakat: Konsep dan Implementasinya*”. Dalam Miftah Thoha (ed). *Administrasi Negara Demokrasi, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ivancevich, dkk. 2008. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Malinowski, Bronislaw. 2003. *The Organization Of Force*. Jakarta: Erlangga.
- Moenir, H.A.S. 2010. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta : Bumi Akasara.
- Moekijat, 2007. *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, Bandung: Mandar Maju
- _____, 2002. *Manajemen Kepegawaian*. Penerbit alumni, Bandung.
- Musanef. 2000. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*. Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Nawawi , Hadari, 2005. *Metode penelitian bidang sosial*, Yogyakarta: Gajahmada Universitas Press.
- Natipulu, Paimin. 2007. *Pelayanan Publik dan Costumer Statisfaction*. Alumni Bandung.
- Rahyunir Rauf, 2007, *Kelembagaan RT dan RW Sejarah, Hakekat dan Prospek Kelembagaan*, Pekanbaru.
- Rahyunir Rauf, 2005, *Menuju RT/RW Profesional (suatu Pedoman, Strategi dan Harapan*, Yayasan Riau Prestasi, Pekanbaru.
- _____, 2001, *Menuju RT/RW Profesional (Suatu pedoman, Strategi dan Harapan)*, Yayasan Riau Prestasi, Pekanbaru.
- Robbin dan Judge.2007. *Perilaku Organisasi*, Jilid2. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, Sondang P. 2003.*Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- _____.2001. *Peranan Staf dalam Manajemen*. Penerbit CV. Gunung Agung, jakarta.
- Dharma Agus. 2000. *Gaya Kepemimpinan yang Efektif Bagi Para Manajer*. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sisk, L. Henry. *Management and Organization; Manajemen dan Organisasi*. Versi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Suprihartono, Jhon. 2002. *Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengembangan Karyawan*. Penerbit LP3E, Yogyakarta.
- Syamsi, Ibnu. 2000. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*”. Jakarta: Rinerka Cipta Prenhalindo.
- Thayeb, Munir. H. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. S, 2003. *Manajemen Modern Untuk Sektor Publik*, Yogyakarta : Balairung & Co.
- Winardi, J.2003. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: Grafindo Persada.
- _____.2004. *Organisasi dan Pengorganisasian Dalam Manajemen*. Penerbit Alumni, Bandung